



Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena *Cancel Culture* di Platform Digital

Nikmah Hadiati Salisah^{1*}, Azha Putri Auwaly², Candy Aulia Putri Umu³, Cindy Ayu Kusuma Putri⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Email: ¹nikmah.hadiati@uinsa.ac.id, ²azhaauwaly@email.com, ³auliacandy22@email.com,
⁴sindyapark@email.com

Abstract

In the digital era, social media has become a major public space where social, political, and cultural discourses thrive. One of the emerging phenomena is cancel culture, which is the collective practice of stopping support for individuals or groups due to actions that are considered problematic. This study aims to explore the perception of Indonesian society towards cancel culture on digital platforms using a qualitative approach. Data were obtained through literature studies, document analysis, and interviews with active users of social media such as Twitter, Instagram, and TikTok. The results of the study show that public perception is divided into two main poles: as a form of social responsibility and as digital persecution. The three main factors that influence this perception are social media as the main source of information, the individual's values and social background, and emotional drives and FOMO. Cancel culture has a significant impact, both psychologically on the targeted individuals, and on society in the form of polarization and the loss of healthy discussion space. This study concludes that although cancel culture has the potential as a tool of social control, its practices need to be criticized so that they remain in line with the principles of justice and freedom of expression in digital democracy.

Keywords: *Cancel Culture, Digital Media, Psychologu Communication, Public Perception, Digital Democracy*

Abstrak

Dalam era digital, media sosial telah menjadi ruang publik utama di mana wacana sosial, politik, dan budaya berkembang pesat. Salah satu fenomena yang mencuat adalah cancel culture, yakni praktik kolektif penghentian dukungan terhadap individu atau kelompok akibat tindakan yang dianggap bermasalah. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap cancel culture di platform digital dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara dengan pengguna aktif media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terbagi menjadi dua kutub utama: sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan sebagai persekusi digital. Tiga faktor utama yang memengaruhi persepsi tersebut adalah media sosial sebagai sumber informasi utama, nilai dan latar belakang sosial individu, serta dorongan emosional dan FOMO. Cancel culture berdampak signifikan, baik secara psikologis terhadap individu yang menjadi target, maupun terhadap masyarakat dalam bentuk polarisasi dan hilangnya ruang diskusi sehat. Studi ini menyimpulkan bahwa

meskipun cancel culture memiliki potensi sebagai alat kontrol sosial, praktiknya perlu dikritisi agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi dalam demokrasi digital.

Kata Kunci: Budaya *Cancel*, Media Digital, Psikologi Komunikasi, Persepsi Publik, Demokrasi Digital

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi ruang publik baru di mana berbagai wacana sosial, politik, dan budaya berkembang dengan sangat cepat. Salah satu fenomena yang mencuat dalam ruang digital tersebut adalah cancel culture. Cancel culture dapat dipahami sebagai praktik sosial kolektif di mana individu atau kelompok dihentikan dukungan sosialnya akibat pernyataan atau tindakan yang dianggap bermasalah. Fenomena ini sering terjadi melalui platform-platform digital seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube, yang memungkinkan penyebaran informasi dan opini secara masif dan instan.

Meskipun awalnya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial *cancel culture* menimbulkan berbagai kontroversi. Di satu sisi, fenomena ini dipandang bermanfaat sebagai alat kontrol sosial yang efektif untuk menuntut keadilan dan memberdayakan suara kelompok marjinal tetapi disisi lain sebaliknya juga dianggap problematik karena dapat mengarah pada penghakiman social sepahak dan hilangnya ruang dialog.

Di tengah perdebatan tersebut, persepsi masyarakat terhadap *cancel culture* menjadi penting untuk diteliti. Bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan merespons fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan nilai-nilai yang berlaku di era digital saat ini. Pemahaman ini juga penting untuk menilai apakah *cancel culture* benar-benar menciptakan perubahan sosial yang konstruktif atau justru memperkuat budaya saling menyerang yang destruktif.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan panduan penelitian, yaitu 1) bagaimana persepsi masyarakat terhadap fenomena *cancel culture* di platform digital? 2) Apa saja faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi masyarakat terhadap *cancel culture*? Pertanyaan ini dianggap tepat karena penelitian ini bertujuan pertama untuk memahami bagaimana masyarakat memandang fenomena *cancel culture* yang marak terjadi di berbagai platform digital, seperti media sosial. Persepsi yang dimaksud mencakup bagaimana masyarakat menilai, memahami, dan merespons praktik *cancel culture*, baik sebagai bentuk kontrol sosial, bentuk kritik terhadap figur publik, maupun sebagai tindakan yang justru dianggap berlebihan atau tidak adil. Dengan mengetahui persepsi ini, penelitian berusaha mengungkap apakah *cancel culture* dipandang sebagai hal yang positif, negatif, atau netral, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat di ranah digital. Tujuan kedua berfokus untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai faktor yang membentuk persepsi masyarakat terhadap *cancel culture*. Faktor-faktor ini bisa meliputi latar belakang sosial, tingkat literasi digital, pengalaman pribadi di media sosial, afiliasi budaya, hingga pengaruh media massa dan opini publik. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai alasan di balik sikap masyarakat terhadap *cancel culture*, serta memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi di era komunikasi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Cancel Culture sebagai Fenomena Sosial Digital

Cancel culture adalah praktik kolektif di mana publik menghentikan dukungan terhadap individu atau kelompok yang dianggap telah melakukan kesalahan secara moral, sosial, atau etis (Ng, 2020). Fenomena ini berakar pada dinamika media sosial yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai dan mengadili secara publik, sering kali tanpa proses verifikasi yang ketat (Clark, 2020). Menurut Clark (2020), cancel culture menjadi bentuk baru dari sanksi sosial berbasis digital yang muncul akibat ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Fenomena ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang mempercepat viralitas isu tertentu.

Fenomena *cancel culture* merupakan salah satu bentuk dinamika sosial yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan kehadiran media digital. *Cancel culture* dapat dipahami sebagai praktik kolektif masyarakat digital untuk mengecam, mengkritik, bahkan memboikot individu, kelompok, atau institusi yang dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, moral, atau ideologi tertentu. Dalam konteks platform digital, *cancel culture* sering kali dilakukan secara masif, melalui penyebaran tagar, thread, unggahan kritik, hingga kampanye boikot (Ng, 2020).

Secara teoritis, *cancel culture* dapat dipandang sebagai bentuk kontrol sosial baru di ruang digital. Dalam perspektif Emile Durkheim, kontrol sosial diperlukan untuk menjaga kohesi dan keteraturan sosial (Durkheim, 1984). Dalam hal ini, masyarakat digital berupaya untuk "mengoreksi" perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai bersama. Praktik ini sering kali terlihat dalam respons terhadap pernyataan rasis, seksual, atau tindakan tidak etis yang dilakukan figur publik atau institusi.

Fenomena *cancel culture* juga tidak bisa dilepaskan dari peran algoritma platform digital yang cenderung memperkuat konten kontroversial. Algoritma media sosial dirancang untuk mempromosikan keterlibatan (*engagement*) pengguna. Konten yang memicu emosi, khususnya kemarahan, cenderung lebih cepat viral (Tufekci, 2015). Dengan demikian, *cancel culture* sering kali menjadi "komoditas atensi", di mana keterlibatan yang tinggi mendatangkan keuntungan bagi platform melalui iklan dan trafik pengguna. Di sisi lain, ekonomi atensi ini memunculkan efek distorsi informasi, di mana fakta sering kali dikalahkan oleh persepsi yang dibentuk secara emosional. Proses *cancelling* lebih sering berbasis pada narasi yang dibangun secara sepotong-sepotong ketimbang fakta utuh, sehingga memperbesar risiko terjadinya *trial by social media* (Vosoughi, 2018).

Secara normatif, *cancel culture* dapat dianggap sebagai manifestasi kebebasan berekspresi. Namun pada kenyataannya, fenomena ini berpotensi mengancam prinsip kebebasan itu sendiri. Dalam konteks demokrasi digital, *cancel culture* sering kali melahirkan budaya "takut salah bicara" (*chilling effect*), di mana individu atau tokoh publik memilih untuk diam atau membatasi pandangannya agar tidak menjadi sasaran *cancelling* (Furedi, 2018).

Media Sosial sebagai Medium Penyebaran Cancel Culture

Media sosial berperan sebagai ruang publik baru yang memungkinkan ekspresi dan partisipasi masyarakat dalam diskursus sosial (boyd, 2014). Platform seperti Twitter, TikTok, dan Instagram telah menjadi media utama dalam menyebarkan opini dan membentuk persepsi publik, termasuk dalam praktik *cancel culture* (Freelon et al., 2018). Viralnya suatu isu yang memicu *cancel culture* seringkali dipengaruhi oleh emosi, kecepatan penyebaran informasi, dan partisipasi masif pengguna yang ingin menjadi bagian dari percakapan digital (Fuchs, 2017).

Fenomena *cancel culture* sebagai produk budaya digital tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan perkembangan media social karena platform media sosial memiliki karakteristik yang memungkinkan terbentuknya komunikasi massa yang bersifat horizontal, cepat, dan interaktif. Namun di balik efektivitasnya dalam menyebarluaskan aspirasi publik, media sosial juga menyimpan problematika serius terkait dinamika kekuasaan, penyebaran informasi, hingga dampaknya terhadap kualitas demokrasi digital.

Dalam konteks komunikasi digital, *cancel culture* tumbuh sebagai respons kolektif publik atas tindakan atau pernyataan yang dinilai bertentangan dengan norma sosial tertentu, baik terkait isu ras, gender, agama, atau moralitas umum. Media sosial menyediakan infrastruktur komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk membentuk opini bersama melalui fitur *like*, *comment*, *retweet*, *share*, dan *hashtag* (Ng, 2020). Salah satu kekuatan besar media sosial adalah kemampuannya menciptakan efek viral dalam hitungan detik, sehingga *cancel culture* berkembang sebagai praktik yang masif dan simultan. Namun, di sisi lain, keterbukaan media sosial menciptakan ruang di mana informasi sering kali tersebar tanpa proses verifikasi yang memadai. Konten yang menimbulkan reaksi emosional seperti kemarahan atau kebencian memiliki peluang lebih besar untuk menyebar luas, didorong oleh algoritma yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna (*engagement-driven algorithm*) (Tufekci, 2015). Akibatnya, praktik *cancelling* kerap tidak berdasarkan pada fakta utuh, melainkan potongan narasi yang dikemas secara provokatif.

Secara normatif, media sosial menjadi instrumen demokratis yang memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapatnya secara bebas. Namun secara kritis, *cancel culture* yang berkembang di media sosial sering kali melahirkan paradoks kebebasan berpendapat. Di satu sisi, masyarakat bebas mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap tindakan seseorang; di sisi lain, kebebasan itu berubah menjadi mekanisme pembungkaman terhadap individu yang sedang menjadi sasaran *cancelling* (Furedi, 2018). Fenomena ini menciptakan apa yang disebut *chilling effect*, yakni kondisi di mana individu atau kelompok menjadi takut menyampaikan pandangan yang berbeda karena khawatir akan menjadi sasaran berikutnya (Richards, 2015). Hal ini pada akhirnya berpotensi membunuh tradisi dialog kritis di ruang publik digital, menggantinya dengan budaya penghakiman massal yang tidak sehat.

Media sosial bekerja bukan hanya sebagai ruang komunikasi, melainkan juga sebagai mesin algoritmik yang mengarahkan atensi pengguna. Algoritma media sosial dirancang untuk menonjolkan konten yang memicu keterlibatan emosional, termasuk kemarahan dan kebencian (Pariser, 2011). Situasi ini memperkuat praktik *cancel culture*, karena semakin kontroversial suatu isu, semakin besar pula peluangnya untuk menjadi viral. Selain itu, algoritma media sosial berpotensi menciptakan filter bubble atau gelembung informasi, di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Akibatnya, proses *cancelling* sering kali terjadi dalam komunitas tertutup yang saling memperkuat keyakinan kolektif mereka tanpa membuka ruang bagi klarifikasi atau perspektif berbeda (Sunstein, 2018).

Salah satu sisi positif dari *cancel culture* di media sosial adalah kemampuannya membangun kesadaran kolektif terkait isu-isu penting seperti pelecehan seksual, rasisme, atau pelanggaran HAM. Banyak kasus yang terungkap ke publik berkat keberanian individu menyuarakan pengalaman pribadinya melalui media sosial, didukung oleh solidaritas pengguna lain (Jackson, 2020). Namun, secara kritis, *cancel culture* juga sering kali berubah menjadi kekerasan simbolik yang menghancurkan reputasi individu tanpa mekanisme keadilan yang adil (Bourdieu, 1991). Proses penghukuman oleh massa ini sering kali terjadi tanpa pertimbangan konteks, sejarah kasus, atau hak jawab dari

pihak yang dituduh. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat merusak tatanan komunikasi publik yang sehat.

Persepsi Masyarakat dalam Konteks Media Digital

Dalam komunikasi persepsi merupakan proses psikologis dalam menafsirkan informasi yang diterima dari lingkungan (Schacter et al., 2011). Dalam konteks media digital, persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh framing informasi, bias konfirmasi, dan efek viralitas. Studi dari Tandoc et al. (2018) menunjukkan bahwa masyarakat sering kali membentuk persepsi berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial, bukan dari proses verifikasi yang rasional, yang menyebabkan penyimpangan persepsi dan potensi ketidakadilan terhadap individu yang menjadi target *cancel culture*.

Persepsi masyarakat terhadap realitas sosial, budaya, dan politik saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran media digital. Media digital telah menjadi kanal utama dalam membentuk cara pandang, sikap, bahkan perilaku publik terhadap suatu isu. Namun, perkembangan ini membawa implikasi ganda: di satu sisi memperluas akses informasi, di sisi lain membuka ruang bagi polarisasi, disinformasi, hingga fenomena cancel culture. Dalam era digital, proses ini diperantarai oleh algoritma media sosial yang memengaruhi *exposure* terhadap konten. Munculnya istilah *filter bubble* yaitu kondisi di mana individu hanya terekspos pada informasi yang memperkuat pandangan atau preferensi mereka sendiri (Pariser, 2011) mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap suatu isu sering kali menjadi parsial atau bias. Adanya respons publik terhadap peristiwa sosial atau politik membuat media digital menciptakan *fragmentasi audiens* sehingga masyarakat tidak lagi memiliki acuan bersama untuk memahami suatu peristiwa. Dengan demikian, persepsi tidak lagi bersandar pada fakta obyektif, melainkan pada narasi yang beredar di lingkaran digital masing-masing individu.

Kehadiran media digital juga memperbesar kemungkinan persepsi masyarakat dibentuk oleh *disinformasi* dan *hoaks*. Hal ini sesuai dengan temuan Wardle & Derakhshan (2017) yang membagi informasi salah menjadi *misinformation*, *disinformation*, dan *malinformation*. Ketiganya berperan besar dalam memanipulasi persepsi publik, khususnya dalam konteks isu-isu sensitif seperti politik, agama, dan identitas budaya. Dalam kasus tertentu, persepsi yang terbangun akibat paparan disinformasi mendorong masyarakat melakukan tindakan sosial yang destruktif, misalnya tindakan persekusi digital atau *cancel culture*. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media digital bukan hanya membentuk persepsi personal, tetapi juga memobilisasi tindakan kolektif berbasis persepsi yang belum tentu faktual.

Lebih jauh, media digital menjadi arena kontestasi makna (*meaning contestation*). Berbagai aktor — mulai dari individu, komunitas, hingga institusi — berlomba-lomba memproduksi dan mendistribusikan makna atas suatu peristiwa. Fenomena ini diperkuat oleh sifat media digital yang *decentralized* dan *user-generated*. Dalam konteks inilah persepsi masyarakat terhadap sebuah isu menjadi sangat cair, bergantung pada narasi mana yang dominan di platform tersebut (Castells, 2012).

Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi Digital

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Dalam konteks digital, kebebasan ini mengalami transformasi mendalam seiring dengan pergeseran ruang publik ke platform media sosial, forum daring, dan kanal digital lainnya. Demokrasi digital menjanjikan keterbukaan dan partisipasi yang lebih luas, namun juga membawa kompleksitas baru terkait etika, privasi, ujaran kebencian, dan disinformasi. Media digital memperluas cakupan kebebasan berekspresi melalui kemudahan akses, interaktivitas, dan kemampuan masyarakat untuk langsung menyuarakan opini tanpa melalui gatekeeper

tradisional seperti media arus utama. Dalam versi digital ruang publik menjadi lebih terbuka dan cair, memungkinkan demokrasi partisipatoris yang lebih dinamis (Dahlberg, 2001).

Namun, kebebasan berekspresi dalam demokrasi digital tidak lepas dari problematika. Media sosial memungkinkan penyebaran opini tanpa batas, termasuk ujaran kebencian, disinformasi, dan serangan personal. Fenomena ini disebut oleh Sunstein sebagai “*echo chambers*” — ruang di mana individu hanya mendengar pandangan yang sejalan dengannya, sehingga memperkuat polarisasi dan intoleransi (Sunstein, 2007). Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi bukan lagi instrumen deliberatif, tetapi bisa berubah menjadi senjata untuk menyerang, membantalkan (cancel), atau mendominasi pihak lain secara digital. Hal ini menciptakan ironi dalam demokrasi digitals karena semakin bebas ruang berekspresi, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya.

Perusahaan platform seperti Facebook (Meta), X (Twitter), dan TikTok kini memegang kekuasaan besar dalam mengatur konten. Mereka menjalankan algoritma yang tidak netral, menentukan visibilitas dan *reach* dari setiap ekspresi publik. Dalam praktiknya, platform bertindak sebagai *regulator informal*, yang secara langsung memengaruhi siapa yang dapat berbicara dan sejauh mana suara mereka didengar (Gillespie, 2018).

Dampak Psikologis dan Sosial Cancel Culture

Fenomena *cancel culture* memiliki dampak besar terhadap individu dan masyarakat. Individu yang menjadi target *cancel culture* sering mengalami tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan trauma sosial (Ng, 2020). Sementara itu, pada tingkat sosial, *cancel culture* dapat menciptakan polarisasi, menghilangkan ruang diskusi, dan menurunkan kepercayaan terhadap media sosial sebagai ruang publik yang sehat (Johnson, 2021). Fenomena *cancel culture* atau budaya pembatalan merupakan praktik sosial di mana individu atau kelompok secara kolektif menarik dukungan dari tokoh publik atau institusi yang dianggap melakukan kesalahan, baik berupa pernyataan kontroversial, tindakan tidak etis, atau pelanggaran norma sosial. Dalam era digital, terutama melalui media sosial, *cancel culture* berkembang menjadi mekanisme kontrol sosial informal yang berbasis partisipasi publik. Meski kerap dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, *cancel culture* juga menyimpan dampak psikologis dan sosial yang kompleks.

Bagi individu yang menjadi target *cancel culture*, dampaknya sering kali bersifat traumatis. Paparan terhadap serangan berulang di media sosial dapat menimbulkan stres berat, kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Studi Williams et al. (2021) menunjukkan bahwa korban *cancel culture* mengalami apa yang disebut sebagai *cyber mobbing trauma*, yakni tekanan mental akibat serangan daring kolektif. Lebih jauh, *cancel culture* juga dapat memicu fenomena *social ostracism* atau pengucilan sosial. Individu yang dibantalkan sering kali kehilangan hubungan profesional, sosial, bahkan keluarga. Hal ini memperburuk kesehatan mental dan menimbulkan rasa kehilangan identitas sosial yang mendalam (Smith, 2018).

Secara sosial, *cancel culture* mendorong terbentuknya budaya ketakutan (*culture of fear*). Banyak individu atau tokoh publik akhirnya memilih untuk membungkam diri atau melakukan *self-censorship* agar terhindar dari risiko pembatalan. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang mendorong diskusi terbuka (Furedi, 2018). Selain itu, *cancel culture* mempercepat polarisasi sosial. Alih-alih menciptakan dialog yang solutif, praktik pembatalan justru sering kali memperuncing sekat identitas antara “yang membantalkan” dan “yang dibantalkan”, menciptakan *us versus them mentality* di ruang publik digital (Furedi, 2018). Hal ini semakin diperparah oleh algoritma media sosial yang memperkuat bias kelompok (*ingroup bias*) melalui *echo chambers* dan *filter bubbles*.

Menariknya, *cancel culture* tidak sepenuhnya bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, praktik ini menjadi bentuk akuntabilitas sosial terhadap pelaku kekerasan, pelecehan seksual, atau tindakan rasisme yang sebelumnya luput dari proses hukum formal. Menurut Ng (2020), *cancel culture* dapat dipandang sebagai upaya korektif dari masyarakat sipil terhadap ketidakadilan struktural (Ng, 2020). Namun, kritik utama terhadap *cancel culture* adalah sifatnya yang sering tanpa mekanisme verifikasi atau keadilan prosedural. Tidak jarang, individu yang menjadi sasaran pembatalan sebenarnya korban disinformasi atau framing media yang manipulatif.

Teori Spiral Keheningan

Teori Spiral Keheningan dari Noelle-Neumann (1974) menjelaskan bahwa individu cenderung diam ketika pendapat mereka berbeda dari mayoritas, karena takut terhadap isolasi sosial. Dalam konteks *cancel culture*, teori ini relevan karena banyak pengguna media sosial memilih untuk tidak bersuara atau menyesuaikan pendapatnya agar tidak menjadi target cancel. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung menyembunyikan pendapatnya jika merasa pandangan tersebut bertentangan dengan opini mayoritas. Hal ini didorong oleh *fear of isolation* atau ketakutan akan dikucilkan secara social (Noelle-Neumann, 1974). Dalam konteks *cancel culture* di era media digital, teori ini menemukan relevansi baru, terutama terkait dengan bagaimana opini publik terbentuk dan dikontrol di platform daring. Fenomena *cancel culture* memperkuat efek Spiral Keheningan secara signifikan. Di ruang digital, ketika opini tertentu dianggap “salah” atau tidak sesuai dengan standar moral komunitas daring, individu yang memiliki pandangan berbeda cenderung memilih diam atau menyembunyikan pendapatnya. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh ketakutan akan kritik, tetapi juga karena ancamannya nyata berupa *persepsi digital*, pembatalan sosial, atau serangan massal melalui media sosial (Ng, 2020).

Lebih lanjut, algoritma media sosial memperparah situasi ini. Algoritma mendorong visibilitas opini-opini dominan, sementara pendapat yang berbeda cenderung tenggelam atau bahkan dihapus oleh moderasi konten. Dengan demikian, *cancel culture* tidak hanya menghasilkan efek Spiral Keheningan secara psikologis, tetapi juga memperkuat dominasi opini mayoritas melalui mekanisme teknologis (Gillespie, 2018). Menurut Noelle-Neumann, ketakutan utama individu untuk menyuarakan pendapat adalah ancaman isolasi sosial. Di era digital, ancaman ini berkembang menjadi isolasi digital, seperti diblokir, ditinggalkan pengikut (*unfollow*), atau dicabut dukungan finansial dari mitra bisnis atau sponsor. Kasus-kasus *cancel culture* sering kali memperlihatkan bagaimana individu publik — selebritas, influencer, bahkan akademisi — kehilangan pekerjaan atau reputasi sosial hanya karena pernyataan kontroversial yang bertentangan dengan arus opini publik daring (Williams, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa *cancel culture* beroperasi tidak hanya sebagai koreksi moral kolektif, tetapi juga sebagai mekanisme pembungkaman yang efektif. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat keberagaman opini dalam diskursus publik.

Ironisnya, efek Spiral Keheningan dalam *cancel culture* justru dapat memperkuat polarisasi sosial. Ketika kelompok minoritas atau individu dengan opini berbeda merasa tertekan untuk diam, mereka cenderung mencari ruang alternatif untuk berekspresi, sering kali dalam kelompok-kelompok yang bersifat eksklusif atau radikal. Hal ini menciptakan segregasi ruang diskusi, di mana perdebatan terbuka tergantikan oleh monolog kelompok tertutup, yang memperbesar jurang polarisasi (Sunstein, 2018). Dalam konteks demokrasi digital, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang memungkinkan perbedaan pendapat dan dialog terbuka. Ketika Spiral Keheningan diperkuat oleh *cancel culture*, maka kebebasan berekspresi yang menjadi fondasi demokrasi digital berpotensi terkikis secara perlahan (Fuchs, 2021).

Teori Agenda Setting dan Framing

Fenomena *cancel culture* sebagai praktik sosial di era digital tidak dapat dilepaskan dari peran media, baik media arus utama maupun media sosial, dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu atau figur publik tertentu. Dua teori komunikasi yang relevan untuk memahami dinamika ini adalah *Agenda Setting Theory* dan *Framing Theory*. Keduanya menjelaskan bagaimana media tidak hanya memberitakan peristiwa, tetapi juga menentukan isu mana yang penting (*agenda setting*) dan bagaimana suatu isu dipahami oleh khalayak (*framing*).

Teori Agenda Setting, sebagaimana dikemukakan oleh McCombs & Shaw (1972) menyatakan bahwa media tidak selalu menentukan *what to think*, tetapi *what to think about*. Dalam praktik *cancel culture*, media berperan besar dalam memunculkan figur atau isu tertentu ke dalam ruang kesadaran publik. Sering kali, proses *cancellation* bermula dari viralnya sebuah berita, potongan video, atau pernyataan yang kemudian diangkat oleh media arus utama maupun akun-akun berpengaruh di media sosial. Salah satu bentuk nyata terlihat dalam kasus publik figur yang pernyataannya viral, lalu menjadi *headline* berbagai media daring. Dengan memunculkan isu tersebut berulang kali, media memperbesar perhatian publik sehingga isu yang semula kecil dapat berkembang menjadi gerakan pembatalan massal (Chadwick, 2017). Namun, agenda yang diangkat oleh media tidak selalu obyektif. Sering kali ada pertimbangan ekonomi (clickbait), politik, atau ideologi tertentu yang membuat media mengutamakan isu tertentu dibandingkan isu lain yang mungkin lebih substantif. Akibatnya, *cancel culture* berpotensi menjadi alat hegemoni opini publik.

Selain menentukan isu, media juga berperan dalam membentuk *how to think* melalui mekanisme *framing*. Teori Framing yang dijelaskan oleh Entman (1993) menyoroti bagaimana media memilih aspek tertentu dari suatu realitas untuk disorot, sehingga membentuk persepsi publik terhadap peristiwa atau tokoh tertentu. Dalam konteks *cancel culture*, *framing* sangat menentukan bagaimana figur publik dipersepsikan. Misalnya, media dapat *framing* tindakan seseorang sebagai bentuk pelecehan, rasisme, atau intoleransi, bahkan ketika konteks aslinya belum sepenuhnya jelas. Dengan memilih kata-kata, kutipan, atau visual tertentu, media membangun narasi yang memperkuat alasan publik untuk melakukan pembatalan (Tuchman, 1978). Hal yang lebih berbahaya adalah *framing simplifikasi*, di mana isu kompleks dipadatkan menjadi narasi “hitam-putih”, padahal dalam banyak kasus, terdapat ruang untuk klarifikasi, diskusi, atau nuansa lain yang hilang dalam pemberitaan.

Di era digital, media sosial mengambil peran sebagai *agenda setter* dan *framer* yang bahkan lebih kuat dibandingkan media konvensional. Influencer, buzzer, atau akun-akun dengan pengikut besar sering kali memulai gelombang pembatalan dengan *framing* tertentu. Platform seperti X (Twitter) atau TikTok menjadi arena kontestasi makna, di mana framing bisa berganti sangat cepat tergantung narasi dominan yang viral pada saat itu (Gillespie, 2018). Fenomena ini mengaburkan batas antara media, individu, dan institusi, menciptakan ekosistem di mana siapa pun bisa menjadi pembentuk agenda publik. Baik dalam *agenda setting* maupun *framing*, risiko bias dan manipulasi sangat besar. Cancel culture kerap dimanfaatkan untuk agenda politik, persaingan bisnis, atau bahkan *character assassination* personal. Ketika media atau influencer sengaja membingkai narasi negatif terhadap seseorang tanpa klarifikasi memadai, maka *cancel culture* menjadi alat persepsi digital yang melanggar prinsip keadilan komunikasi (Fuchs, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mendalami fenomena *cancel culture* sebagai praktik sosial digital di platform media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman mendalam dari informan terkait topik yang diteliti (Creswell, 2014). Informan ditentukan dengan kriteria 1) Aktif menggunakan media sosial minimal 3 tahun terakhir; 2) Pernah terlibat atau menyaksikan langsung fenomena *cancel culture* di media sosial; 3) Berusia antara 18–35 tahun (generasi digital aktif); 4) Memiliki kapasitas untuk menjelaskan pengalaman atau persepsinya secara verbal dengan baik; 5) Termasuk juga praktisi media, aktivis digital, atau akademisi komunikasi untuk memberikan perspektif kritis. Jumlah Informan sebanyak 8–12 orang dengan menerapkan prinsip *saturation* (pengumpulan data dihentikan apabila informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak ada temuan baru). Proses Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara semi-terstruktur (menggunakan pedoman pertanyaan, namun fleksibel dalam pengembangannya sesuai respons informan) melalui media WhatsApp untuk kenyamanan dan efektivitas. Teknik pengumpulan data menggunakan 1) Studi Literatur dengan memanfaatkan jurnal, buku, laporan penelitian, dan artikel relevan mengenai *cancel culture*, media sosial, serta teori-teori komunikasi terkait (agenda setting, framing, spiral keheningan), 2) Analisis Dokumen dengan kaji dokumen-dokumen daring berupa berita, unggahan media sosial, komentar netizen, atau tangkapan layar kasus *cancel culture* yang relevan; 3) wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi struktur. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik (*thematic analysis*) karena merupakan metode analisis data kualitatif yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan pelaporan pola atau tema dalam data (Braun, 2006). Dalam penelitian tentang *cancel culture* sebagai fenomena sosial digital, teknik ini dipilih karena mampu menangkap keragaman makna dan pengalaman informan terkait persepsi, sikap, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara terhadap beberapa responden yang aktif menggunakan platform digital seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, terungkap adanya berbagai pandangan yang mencerminkan kompleksitas persepsi masyarakat terhadap *cancel culture*.

Dari hasil pengumpulan data, ditemukan adanya **dua kutub persepsi** masyarakat terhadap fenomena *cancel culture* yang diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Dua Kutub Persepsi

No	Kutub Persepsi	Deskripsi Umum
1	Persepsi Positif (Pro Cancel Culture)	<i>Cancel culture</i> dipandang sebagai alat kontrol sosial terhadap figur publik atau institusi yang melakukan kesalahan, khususnya terkait isu moral, etika, rasisme, pelecehan seksual, atau ujaran kebencian. Praktik ini dianggap sebagai bentuk “ <i>social justice</i> ” alternatif ketika sistem formal tidak mampu bertindak cepat atau adil.
2	Persepsi Negatif (Kontra	<i>Cancel culture</i> dipandang sebagai praktik persekusi digital yang penuh bias, subjektif, dan emosional. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk pembungkaman yang merusak ruang demokrasi,

No	Kutub Persepsi	Deskripsi Umum
	Cancel Culture)	menciptakan budaya takut, dan tidak memberi ruang klarifikasi atau pemulihan bagi pihak yang dibatalkan.

Menariknya, kedua kutub persepsi ini bisa ditemukan dalam individu yang sama dimana seseorang dapat mendukung cancel culture dalam kasus tertentu, namun menolaknya dalam kasus lain, tergantung pada konteksnya.

Dari hasil pengumpulan data bisa nampak adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi. Berdasarkan hasil analisis tematik, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi perbedaan persepsi seperti nampak dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pengaruh Terhadap Persepsi

Faktor	Pro cancel	Kontra cancel
1.	Semakin serius kesalahan, semakin kuat dukungan terhadap cancel culture.	Jika kasus dianggap sepele atau sekadar perbedaan pendapat, responden cenderung menolak cancel culture.
2. Peran Media	Media yang menyoroti isu dengan framing moral atau aktivisme memperkuat pembatalan.	Framing media yang terlalu <i>bias</i> atau memotong konteks dianggap manipulatif, memicu resistensi terhadap cancel culture.
3. Norma Sosial Digital (Netizen Culture)	Jika lingkungan digital yang diikuti informan mendukung pembatalan, maka ada kecenderungan ikut mendukung.	Lingkungan digital yang inklusif dan mendukung kebebasan berekspresi membuat responden kritis terhadap praktik cancel culture.
4. Pengalaman Pribadi	Responden yang pernah menjadi korban cancel culture cenderung memandangnya negatif.	Sebaliknya, yang pernah merasa diperlakukan adil oleh netizen lewat cancel culture cenderung mendukungnya.

Kedua pengelompokan temuan tersebut mengarah pada adanya keterkaitan yang sangat erat antara media dan persepsi. Diperkuat dengan Teori Agenda Setting dan Framing berperan dalam menjelaskan terbentuknya kedua kutub persepsi tersebut. Media yang mengangkat isu tertentu secara berulang dengan framing moral akan membentuk persepsi pro-*cancel culture*. Sementara media yang menampilkan narasi tandingan atau membongkar framing manipulatif akan memunculkan persepsi kontra terhadap *cancel culture*. Lebih lanjut Teori Spiral Keheningan menjelaskan bagaimana individu yang memiliki pandangan kontra cenderung diam di tengah gelombang opini publik yang mendukung *cancel culture*. Ini memperkuat persepsi bahwa *cancel culture* selalu positif, padahal banyak suara kontra yang tidak terdengar. Dampaknya Kutub persepsi *pro* menjadi semakin dominan karena individu kontra memilih diam untuk menghindari isolasi sosial. Nampak kecenderungan munculnya praktik polarisasi dalam norma sosial digital. Budaya digital (*netizen culture*) membentuk *polarized echo chambers*. Di ruang-ruang tertentu (misalnya komunitas aktivis digital), *cancel culture* menjadi norma sosial yang diterima. Sebaliknya, di komunitas intelektual atau aktivis kebebasan berekspresi, *cancel culture* justru dipandang sebagai ancaman terhadap demokrasi digital.

Pembahasan

Bagaimana faktor-faktor yang ada tersebut membentuk kedua kutub persepsi dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Faktor Karakteristik Digital dalam Persepsi

Faktor	Persepsi Pro	Persepsi Kontra
Media Sosial	Viralitas → Kekuatan kolektif → Keadilan sosial	Framing sepihak → Ketidakadilan → Persekusi digital
Algoritma	Menguatkan dukungan kelompok	Menyingkirkan opini berbeda
Norma Kelompok	Tekanan komunitas → ikut mendukung	Trauma, pengalaman buruk → Menolak
Spiral Keheningan	Mengaburkan suara-suara minoritas	Membuat mereka enggan bersuara

Pengkategorian dalam tabel diatas menggambarkan bahwa *cancel culture* bisa menjadi alat kekerasan simbolik ketika dijalankan tanpa verifikasi informasi yang memadai. Respons emosional massa juga berpotensi menghilangkan kesempatan dialog dan rehabilitasi (Clark, 2021). Dari kedua persepsi tadi ada beberapa faktor utama yang memengaruhi pembentukan persepsi masyarakat terhadap *cancel culture*, antara lain:

1. Media sosial sebagai sumber informasi ttama

Mayoritas informan menyatakan bahwa mereka mengetahui kasus *cancel culture* dari media sosial, bukan dari media konvensional. Hal ini memengaruhi cara mereka menilai dan merespons sebuah kasus berdasarkan narasi yang beredar secara viral.

2. Nilai dan Latar Belakang Sosial

Persepsi terhadap *cancel culture* juga dipengaruhi oleh nilai pribadi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman individu. Responden dengan latar belakang studi komunikasi atau hukum cenderung lebih kritis terhadap praktik *cancel culture*.

3. Kecenderungan Emosional dan FOMO (*Fear of Missing Out*)

Dorongan emosional dan keinginan untuk menjadi bagian dari tren juga menjadi faktor penting. Beberapa responden mengakui bahwa mereka ikut menyuarakan tagar #Cancelled tanpa benar-benar memahami konteks permasalahan, semata-mata karena kasus tersebut sedang viral (Sharpe, 2022).

Fenomena *cancel culture* juga membawa dampak signifikan, baik bagi individu yang menjadi target maupun masyarakat secara umum. Individu yang terkena *cancel culture* bisa mengalami kerugian psikologis dan sosial. Sedangkan masyarakat bisa mengalami polarisasi opini dan minimnya ruang diskusi yang sehat.

Isi tabel juga menunjukkan bahwa fenomena *cancel culture* terbentuk dari interaksi kompleks antara media sosial, framing sepihak, algoritma, dan norma kelompok. Keempat faktor tersebut saling memperkuat dan berkontribusi dalam mempercepat serta memperluas proses pembatalan sosial terhadap individu atau kelompok tertentu. Media sosial menjadi medium utama dalam pembentukan *cancel culture* karena sifatnya yang memungkinkan pesan menyebar secara cepat dan luas (viralitas). Mekanisme ini menciptakan Kekuatan kolektif yang muncul ketika massa digital bersatu menyuarakan pendapat atau kecaman dan Dorongan keadilan social dimana publik merasa memiliki kuasa moral untuk menuntut akuntabilitas, khususnya atas tindakan yang dianggap tidak

etis. Namun, kekuatan ini dapat bersifat ambivalen yang disatu sisi bisa menjadi alat koreksi sosial dan disisi lain sekaligus juga rawan digunakan secara tidak proporsional atau tanpa kejelasan konteks.

Konsekuensi prinsip algoritma sebagai penguat resonansi dan polarisasi menjadikan platform media sosial dapat mengoptimalkan keterlibatan pengguna, memperkuat dukungan kelompok dominan karena konten yang serupa dengan keyakinan pengguna lebih sering ditampilkan, serta mendorong pembentukan opini kolektif yang lebih homogen dan tidak kritis, sehingga mempercepat proses pembatalan atau penolakan sosial.

Praktik framing sepihak melalui media sosial pada gilirannya melahirkan bias naratif dan persekusi digital. Informasi dalam cancel culture sering kali disebarluaskan dengan framing sepihak, yaitu narasi yang hanya mengangkat satu sudut pandang dan mengabaikan konteks atau klarifikasi. Hal ini menyebabkan interpretasi publik menjadi simpel dan hitam-putih dan mendorong terbentuknya persepsi keadilan sosial semu yang diikuti oleh persekusi digital, seperti doxing, penghinaan massal, atau ancaman.

Dalam perspektif komunikasi kelompok, norma kelompok terbentuk dari nilai dan harapan komunitas daring tertentu. Dalam praktik cancel culture tekanan komunitas membuat individu merasa harus mengikuti opini mayoritas agar tidak ikut "dibatalkan". Suara-suara minoritas menjadi kabur atau tidak terdengar, karena takut dikucilkan, menghindari konflik, dan tidak merasa aman dalam mengungkapkan pendapat berbeda. Situasi ini pada gilirannya dapat menciptakan iklim digital yang intoleran terhadap perbedaan, melemahkan diskursus kritis dan keberagaman pandangan. Juga dapat dikatakan bahwa cancel culture bukan sekadar respons atas kesalahan moral, tetapi merupakan hasil dari dinamika struktural dalam ekosistem digital. Media sosial sebagai medium, algoritma sebagai penguat, framing sepihak sebagai pemicu emosi, dan norma kelompok sebagai regulator sosial—semuanya membentuk lanskap di mana pembatalan sosial menjadi cepat, massal, dan sering kali tidak proporsional.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *cancel culture* di platform digital merupakan gejala sosial yang kompleks dan memunculkan beragam persepsi di masyarakat. Sebagian masyarakat memandang cancel culture sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menegakkan keadilan dan menjaga etika ruang digital, sementara sebagian lainnya mengkritisinya sebagai bentuk persekusi digital yang merugikan individu baik secara psikologis maupun sosial. Fenomena ini terbukti membawa dampak yang signifikan, baik di tingkat individu—seperti tekanan mental, isolasi sosial, dan kehilangan pekerjaan—maupun di tingkat masyarakat—seperti polarisasi opini dan hilangnya ruang dialog yang sehat. Oleh karena itu, meskipun *cancel culture* memiliki potensi sebagai alat kontrol sosial, penerapannya perlu dikritisi dan dijalankan secara bijak agar tidak mengorbankan prinsip keadilan, kebebasan berekspresi, serta nilai-nilai demokrasi digital.

Sebagai implikasi dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa 1) munculnya dilema demokrasi digital dalam artian *cancel culture* memperlihatkan dilema antara kebutuhan akan akuntabilitas sosial dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi; 2) pentingnya perhatian pada kebutuhan literasi media karena rendahnya literasi media menyebabkan masyarakat mudah terbawa arus framing tanpa klarifikasi, memperkuat gelombang *cancel* yang impulsif; dan 3) adanya potensi polarisasi jangka panjang, dalam artian apabila tren ini berlanjut tanpa penguatan mekanisme dialog, ruang publik digital Indonesia berisiko mengalami segregasi opini dan fragmentasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- boyd, d. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Clark, M. (2020). Cancel culture: The emergence of a new moral order. *Social Media + Society*, 6(3), 1–3. <https://doi.org/10.1177/2056305120948181>
- Clark, M. D. (2021). Weaponizing social accountability: The symbolic violence of cancel culture. *Journal of Digital Ethics*, 4(1), 22–37.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dahlberg, L. (2001). The Internet and democratic discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums extending the public sphere. *Information, Communication & Society*, 4(4), 615–633.
<https://doi.org/10.1080/13691180110097030>
- Durkheim, E. (1984). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). The Free Press. (Original work published 1893)
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Freelon, D., McIlwain, C. D., & Clark, M. D. (2018). Quantifying the power and consequences of social media protest. *New Media & Society*, 20(3), 990–1011. <https://doi.org/10.1177/1461444816676646>
- Fuchs, C. (2017). *Social media: A critical introduction* (2nd ed.). Sage Publications.
- Fuchs, C. (2021). *Communication and Capitalism: A Critical Theory*. University of Westminster Press. <https://doi.org/10.16997/book45>
- Furedi, F. (2018). *How fear works: Culture offear in the twenty-first century*. Bloomsbury Publishing.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Jackson, S. J. (2020). *Hashtag activism: Networks of race and gender justice*. MIT Press.
- Johnson, A. (2021). The consequences of cancel culture on social trust and discourse. *Journal of Media Ethics*, 36(2), 80–91.
<https://doi.org/10.1080/23736992.2021.1903847>

- Marwick, A. E., & Lewis, R. (2017). *Media Manipulation and Disinformation Online*. Data & Society Research Institute.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Ng, E. (2020). No grand pronouncements here...: Reflections on cancel culture and digital media participation. *Television & New Media*, 21(6), 621–627. <https://doi.org/10.1177/1527476420918828>
- Nguyen, C. T. (2020). Echo Chambers and Epistemic Bubbles. *Episteme*, 17(2), 141–161.
- Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence: A theory of public opinion. *Journal of Communication*, 24(2), 43–51. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x>
- Nussbaum, M. C. (2019). *The Monarchy of Fear: A Philosopher Looks at Our Political Crisis*. Simon & Schuster.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Richards, R. (2015). The chilling effect of surveillance. *Harvard Law Review*, 124(5), 1935–1965.
- Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. (2011). *Psychology* (2nd ed.). Worth Publishers.
- Sharpe, T. (2022). Riding the wave: Social media users and the bandwagon effect in cancel culture. *Digital Society Studies*, 4(1), 45–61.
- Smith, J. (2018). The social cost of public shaming: Ostracism in the age of cancel culture. *Journal of Digital Behavior*, 10(2), 129–142.
- Sunstein, C. R. (2007). *Republic.com 2.0*. Princeton University Press.
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Tuchman, G. (1978). *Making news: A study in the construction of reality*. Free Press.
- Tufekci, Z. (2015). Algorithmic harms beyond Facebook and Google: Emergent challenges of computational agency. *Colorado Technology Law Journal*, 13(203), 203–218.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>
- Williams, A. L., Thomas, K. M., & Jones, R. T. (2021). Cyber mobbing trauma: Psychological impact of cancel culture on digital targets. *Journal of Internet Psychology*, 3(2), 98–112.